MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : Bahwa menurut pasal 82 UU No. 1/1995 Direksi (ic Termohon Pailit II). Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan karena itu Termohon Pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya mewakili Termohon Pailit I (PT. KAWI) didalam atau diluar pengadilan, dengan demikian putusan yang dimohonkan PK harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum (Pasal 286 ayat (2) b. UUK.
- NOMOR REGISTER** : 01 PK/N/2004
- TANGGAL PUTUSAN** : 23 Maret 2004
- MAJELIS** : 1. Prof. DR. Bagir Manan, SH.
2. Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
3. Ny. Marianna Sutadi, SH.
- KLASIFIKASI** : Arti utang (yang timbul dari transaksi jual beli kayu gelondongan)
- DUDUK PERKARA** : - Bahwa pemohon pailit adalah suatu PT yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tgl 7 Januari 1986 yang bergerak dalam usaha perkayuan gelondongan.
- Bahwa pemohon pailit dilakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon Pailit I menjual kayu gelondongan.
- Bahwa Termohon Pailit I telah menerima kayu gelondongan sejumlah 529 pcs dari pemohon Pailit pada tanggal 7 November 1997 sesuai tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/1997 (Bukti P-2) dengan harga USD 179.412.48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pembayarannya sudah jatuh tempo.

- Bahwa keterikatan Termohon Pailit II dalam permohonan kepailitan ini adalah sebagai Direktur Utama dan Pemegang saham dari Termohon Pailit I yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng, yaitu antara termohon Pailit I dan termohon pailit II.
- Bahwa Termohon pailit I dan Termohon pailit II mempunyai utang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada pemohon pailit, dan memenuhi persyaratan pailit juga mempunyai hutang kepada dua kreditur lain.

AMAR PUTUSAN PN :

1. Menolak permohonan persyaratan pailit dari pemohon.
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

AMAR PUTUSAN KASASI :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi : PT. Wijaya Indah Permai.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surabaya tgl. 9 Oktober 2003 No. 07/Pailit/2003/PN. Niaga SBY.

Mengadili Sendiri

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
- Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;
- Menyatakan Termohon I PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jln. Jend. A. Yani Km. 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan harta milik Termohon Pailit I dan II jatuh dalam sitaan umum;
- Memerintahkan pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;

- Mengangkat CORNELIUS BENYJ, SH dari kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & PARTNERS, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower lantai 15, Jln. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 dengan surat terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05. 14-0 1 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;
Menghukum para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I dan II untuk membayar ongkos perkara pada semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

ALASAN P.K :

Alasan Pemohon PK I /Termohon pailit I sbb :

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada putusan halaman 15 dan 16 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum tentang pengertian utang. Dalam arti luas dan pembuktiannya secara sederhana.
2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusan halaman 16 point 1 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukumnya, yaitu penerapan pasal 6 ayat (3) UU No. 4/1998.
3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa dan mengadili In cash perkara ini tidak objektif dalam menilai, meneliti serta mempertimbangkan bukti-bukti.
4. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-13 dan bukti T.I-1 s/d T.I-4 maka secara hukum tidaklah dapat disangkal lagi bahwa penyelesaian perkara ini tidak dapat dibuktikan dengan secara sederhana.

Alasan pemohon PK II/Termohon Pailit II sbb :

1. Bahwa pertimbangan MA pada halaman 16 butir 1 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan Termohon Pailit I dan II telah terbukti berutang kepada Pemohon Kasasi/pemohon Pailit.
2. Bahwa Pertimbangan MA pada halaman 16 butir 2 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, yaitu meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, Direktur dan Komisaris, para Termohon Kasasi/Termohon Pailit I dan II sebagai badan hukum tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.
3. Bahwa pertimbangan MA halaman 16 butir 3 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, yaitu Termohon Pailit I dan II tidak bisa dipisahkan dalam transaksi terhadap pemohon kasasi.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa menurut hukum Pasal 82 UU No. 1/1995 Direksi (ic Termohon Pailit II) bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan

perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Karena itu Termohon Pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya mewakili Termohon Pailit I (PT. KAWI) didalam atau diluar pengadilan, dengan demikian putusan yang dimohonkan PK harus dibatalkan. Karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana pasal 286 ayat (2) b. UUK.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

- Mengabulkan permohonan PK dan Pemohon PK (I) PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) dan (2) Tobeng Mahatani.
- Membatalkan putusan MA tgl 20 Nopember 2003 No. 030 K/N/2003.

MENGADILI KEMBALI :

- Menolak Permohonan pernyataan pailit dari pemohon PT. Wijaya Indah Permai.
- Menghukum Termohon PK Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan PK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

SA'AR SUJIANA, SH.

PUTUSAN

Nomor : 01 PK/N/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

1. **PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI)** berkedudukan di Jalan. A. Yani Km. 4,5 No. 18-19 Banjarmasin 70249, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **DICKY RICHARD GIMON, SH** dan **SOETOMO, SH.M.Hum.**, para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65-67 Olympic Hotel, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003;
2. **TOBENG MAHATANI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **DOREL ALMIR, SH** dan **JUL HERFI, SH.**, para Pengacara, beralamat di Wisma Benhil lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 36 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I dan II /Para Termohon Pailit I dan II/ Debitur;

m e l a w a n

PT. WIJAYA INDAH PERMAI, berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin 70111, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **RUDI AGUSTIAN HASSIM, SH,MH**, **ENDANG SUPRIYONO, SH**, **HASAN KARNAN, SH,MH** dan **ZAINUDDIN SOTI, SH**, para Pengacara, beralamat di Wisma Mitra Sunter Blok C.2 lantai 16, Jln. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta-14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2003, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit/Kreditur.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 No. 030 K/N/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan posita perkara sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 7 Januari 1986 yang bergerak dalam usaha perkayuan antara lain pemasok dan penjual kayu gelondongan yang berkedudukan di Jln. Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin-Kalimantan Selatan 70111;
Tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa Pemohon Pailit dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon Pailit I, dimana Pemohon Pailit telah menjual kayu gelondongan (log) kepada Termohon I sebagai pembeli yang diwakili oleh Termohon Pailit II yang bertindak sebagai Direktur Utama dan pemegang saham;
- Bahwa Termohon Pailit I telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi objek jual beli sejumlah 529 Pcs dari Pemohon Pailit pada tanggal 7 November 1997 sesuai tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/1997 (bukti P-2);
- Bahwa harga jual beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I sebagaimana diuraikan diatas adalah sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,- dan harga kayu gelondongan (log) dari DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai atau pembayaran telah jatuh tempo pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) oleh Termohon Pailit I dan Pemohon Pailit yaitu pada tanggal 7 Nopember 1997;
- Bahwa Pemohon Pailit sebagai penjual kayu gelondongan (log) yang beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli kepada Termohon Pailit I, namun ternyata kemudian Termohon Pailit I sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-;
- Bahwa atas hutang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan harus dibayar. Pemohon Pailit telah berkali-kali melakukan penagihan (bukti P-3 dan bukti P-4) namun Termohon Pailit I selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan (bukti P-5);
Tentang kedudukan Pemohon sebagai kreditur dari Termohon II;
- Bahwa keterkaitan Termohon Pailit II dalam permohonan kepailitan ini karena Termohon Pailit II sebagai Direktur Utama dan pemegang saham dari Termohon

Pailit I yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng. Kewajiban tanggung renteng Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum Termohon Pailit II, Samudra & Partner No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 (bukti P-6) No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 (bukti P-7) dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (bukti P-B);

- Bahwa atas hutang-hutang Termohon Pailit I tersebut, Pemohon Pailit telah melakukan penagihan-penagihan, namun baru setelah hutang tersebut berjalan hampir 3 tahun, melalui berbagai cara akhirnya pada tanggal 22 Maret 2003 terjadi pertemuan oleh dan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I yang diwakili oleh Termohon Pailit II, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Termohon Pailit I maupun sebagai diri sendiri. Dalam pertemuan tersebut, diadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas hutang USD dan 12 % (dua belas persen) pertahun atas hutang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei/Juni 2000 sampai dengan Desember 2000 (bukti P-9);
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo terakhir kesepakatan sebagaimana disebutkan diatas, pada tanggal 22 Desember 2000, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar Rp. 504.304.581,- sedangkan kewajiban hutang Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit sebesar USD 179.412,48 beserta denda keterlambatan pembayarannya sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan tidak pernah dilunasinya;
- Bahwa Pemohon Pailit telah mengirimkan somasi kepada Termohon Pailit I untuk segera melunasi kewajibannya baik hutang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran, hal ini terbukti dengan somasi sesuai dengan surat Pemohon Pailit No. 108/RAH-Law Firm/VII/2002 tanggal 22 Juli 2003 (bukti P-b);
- Bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II melalui kuasa hukumnya kembali mencari-cari berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yang pada intinya adalah berusaha untuk menghindar dari kewajiban hutangnya kepada Pemohon Pailit (vide bukti P-6, P-7 dan P-B);
- Bahwa dikarenakan jalan secara musyawarah tidak tercapai, maka Pemohon Pailit menyampaikan surat peringatan terakhir No. 277/RAH – Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 (bukti P-II) kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar USD 390.790,22 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua puluh dua dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari :
 - a. Hutang pokok : USD 179.412,48;
 - b. Denda keterlambatan
pembayaran : USD 211.377,74;

belum termasuk biaya-biaya penagihan dan biaya-biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II mempunyai hutang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit, sehingga dengan demikian Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II memenuhi persyaratan pailit; Tentang Termohon Pailit I mempunyai hutang kepada Kreditur lain, selain Pemohon Pailit;
- Bahwa Termohon Pailit I juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu :
 - a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dari PT. Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 01 Agustus 2003 (bukti P-12 dan bukti P-6);
 - b. PT. Sinarinda Buana Selaras, beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 5 RT.27 Banjarmasin (bukti P-13 dan bukti P-6);Tentang permohonan sita jaminan serta penunjukkan Hakim Pengawas dan Kurator;
- Bahwa guna melindungi kepentingan Pemohon Pailit, karena dikhawatirkan Termohon Pailit hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon Pailit, maka kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon Pailit yang sekarang ada maupun yang akan ada guna menjamin pelaksanaan pembayaran keseluruhan jumlah hutang;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Pemohon Pailit mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator dari Termohon Pailit sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon Pailit menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
3. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;
4. Menyatakan Termohon I : PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5

No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Termohon II : TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon yang sekarang ada maupun yang akan ada;
7. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
8. Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52653 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. CHT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 2003 Nomor 030 K/N/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Kasasi : PT. Wijaya Indah Permai tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY.

Mengadili sendiri :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
- Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;
- Menyatakan Termohon I PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di JL. Jend. A. Yani Km. 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan harta milik Termohon Pailit I dan II jatuh dalam sitaan umum;
- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengangkat Hakim pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & PARTNERS, beralamat Kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. CHT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;

Menghukum para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I dan II untuk membayar ongkos perkara pada semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 No. 030 K/N/2003 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi I dan II dahulu para Termohon pailit I dan II pada tanggal 3 Desember 2003, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tanggal 19 Desember 2003 dengan disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 19 Desember 2003 itu juga, sedangkan Termohon Kasasi II / Termohon Pailit II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003 diajukan permohonan peninjauan-kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 17 Desember 2003 dengan disertai memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 17 Desember 2003 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Desember 2003 dan 17 Desember 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 23 Desember 2003 dan 24 Desember 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Pailit I telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada putusan halaman 15 dan 16 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum tentang pengertian “utang” dalam arti luas dan “pembuktiannya secara sederhana”.
 - Bahwa berpijak pada surat bukti tertanda P-2 adanya hubungan hukum yang terjadi karena adanya transaksi jual-beli kayu gelondongan (Log) antara Termohon Peninjauan Kembali Pemohon Pailit sebagai pihak penjual dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Pailit I yang pada saat itu telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon Pailit II selaku Direktur dan mewakili PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial sebagai pembeli, dan bukan berawal dari penjanjian pinjam-meminjam uang ataupun dalam bentuk perjanjian-perjanjian lainnya.
 - Bahwa oleh karena hubungan hukum yang terjadi adalah menyangkut jual-beli kayu gelondongan (Log) sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka menurut hukum yang terjadi adalah merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri, dan bukan merupakan wewenang Pengadilan Niaga in cash sebagaimana berupa Permohonan Pernyataan Pailit yang dimohonkan Pemohon Pailit dalam perkara ini.
 - Bahwa Majelis Hakim kasasi berusaha memaksakan kehendaknya dan sangat berlebihan telah menginterpretasi terhadap makna dan pengertian jual-beli yang dikategorikan sebagai pengertian utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, padahal pengertian utang dalam kaitan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang atau salah satu sebagaimana bentuk khusus dari berbagai perikatan (verbintennis) pada umumnya yang seperti jual-beli, sewa-menyewa, penitipan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 05 PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 yang dimaksud berbeda dengan pengertian utang yang sebagai bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 019 PK/N/1999, tanggal 18 Oktober 1999;
2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 16 juga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa adanya utang pada Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II dapat dibuktikan secara sederhana, padahal perkara ini bersumber dari transaksi jual beli sebagaimana yang diuraikan diatas, yang pembuktiannya tidak bersifat sederhana lagi;

3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 16, angka dua dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, Direktur dan Komisaris namun para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II, sebagai badan hukum (Rechtspersoon) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Selain itu perbuatan pengalihan saham-saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual-beli saham Nomor 135, tanggal 19 Oktober 2001;
 - Bahwa menurut surat bukti tertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.II-3, telah terjadinya pengalihan kepemilikan saham dan sekaligus pergantian susunan pengurus dari PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial, konsekuensi hukumnya patut dipertanyakan mengenai siapakah yang patut bertanggung jawab terhadap pembayaran atas transaksi jual-beli kayu gelondongan (Log) tersebut. Untuk menentukan hal tersebut jelas tidak tepat dan keliru sekali kalau pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali I / Termohon pailit I untuk membayarnya, karena berdasarkan bukti T.I.1 s/d T.I.3 dan bukti T.II.3 serta bukti dari P.2 s/d P.13, maka pertanggung jawabannya haruslah dipilah-pilah sesuai dengan adanya hubungan hukum yang terjadi dan hal ini memerlukan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana;
4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya halaman 16 point 1 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukumnya, yaitu penerapan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit tersebut, namun karena merupakan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon Kasasi semula Termohon pailit I dan II;
 - Bahwa sebaliknya dan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti bahwa para Termohon Kasasi/Termohon Pailit I dan II telah terjadi pengalihan saham dan disertai dengan perubahan susunan pengurus sesuai bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.II-3, dengan berpijak pada bukti-bukti tersebut maka sebagai konsekuensi hukumnya segala bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Pailit I dengan Termohon Pailit II setelah adanya pengalihan saham dan perubahan susunan pengurus, secara hukum harus dipisahkan pertanggungjawabannya;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon Pailit II berpendapat bahwa Majelis Hakim kasasi dalam memeriksa dan mengadili in cash perkara ini tidak obyektif dalam menilai, meneliti serta mempertimbangkan bukti-bukti karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut sebenarnya tidak

mempunyai dasar hukum sama sekali karena dasar permohonannya semata-mata hanya didasarkan surat bukti yang bukan merupakan bukti utang piutang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan;

6. Bahwa berpijak dari adanya surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi tertanda P-1 s/d P-13 maupun bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon pailit I tertanda T.I-1 s/d T.I-4 serta Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon pailit II tertanda T.II-1 s/d T.II-6, maka secara hukum tidaklah dapat disangkal lagi bahwa penyelesaian perkara ini tidak dapat dibuktikan dengan secara sederhana;
7. Bahwa terlepas dari apa yang telah kami kemukakan diatas, yang jelas secara de facto Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon pailit I adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perkayuan yang memproduksi plywood dengan mempekerjakan ribuan karyawan, maka seandainya perusahaan tersebut dipailitkan maka dampak atau akibat dari kepailitan tersebut sangat besar terhadap sekian ribu karyawan/buruh yang terpaksa akan kehilangan mata pencaharian/pekerjaannya karena perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Pailit II, tanggungan apalagi sebagian besar karyawan tersebut mempunyai keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/ Termohon Pailit II telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 16 butir 1 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II telah terbukti berutang kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit, padahal Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah berutang atau mempunyai hutang kepada Termohon Peninjauan Kembali sehingga antara Pemohon Peninjauan-kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak ada hubungan hukum.
Bahwa yang menjadi persoalan hukum apakah seseorang atau badan hukum yang tidak pernah mempunyai hutang dapat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar atau dihukum untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak pernah diperbuatnya. Dalam hubungan ini, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah berutang atau mempunyai hutang dengan Termohon Peninjauan Kembali dan tidak ada satupun bukti yang membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hutang dengan Termohon Peninjauan Kembali.
2. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 16 butir 2 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, direktur dan komisaris, para Termohon Kasasi/Termohon Pailit I dan II, sebagai badan hukum (rechtspersoon) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang

telah dilakukan. Selain itu, perbuatan pengalihan saham-saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual beli saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001.

- Bahwa walaupun dahulu sebelum terjadi perubahan kepemilikan saham dari susunan direksi dan komisaris, kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur Utama pada saat itu jelas mewakili PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Pailit I/Termohon Kasasi) sebagai badan hukum, oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan bila tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Bahwa ternyata tidak ada satu buktipun atau putusan pengadilan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur, sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan Majelis Kasasi;
 - Bahwa dalam pertimbangannya ini Majelis Hakim Agung terlihat ragu-ragu atas pertimbangan hukumnya tersebut yang dapat dilihat dengan jelas dan nyata dengan menyebutkan bahwa meskipun telah terjadi perubahan kepemilikan saham. Selain itu, pengalihan saham-saham belum merupakan transaksi riil dan hal ini membuktikan bahwa pengalihan saham telah terjadi, tetapi kemudian pada bagian akhir pertimbangan menyatakan belum terjadi transaksi riil. Pertimbangan yang demikian adalah kontradiktif dan jelas sangat tidak dibenarkan oleh hukum.
 - Bahwa berdasarkan bukti T.I.1 Akta Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 telah terjadi jual beli saham dalam PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/Termohon Pailit) kepada PT. SINARINDO BUANA SELARAS, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang dimaksud.
3. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 16 butir 3 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksi terhadap Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit tersebut, karena meskipun Termohon Pailit I sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (perseroan terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka hutang yang timbul dari transaksi jual beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon kasasi semula Termohon Pailit I dan II, padahal tidak ada dasar hukumnya Pemohon Peninjauan Kembali harus bertanggung jawab atas hutang PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I), siapa yang

berbuat ia yang bertanggung jawab dalam hal ini. PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I).

- Bahwa seperti telah dijelaskan di atas Pemohon Peninjauan Kembali pada saat terjadi jual beli dimaksud berstatus sebagai direktur utama yang diatur dan dijamin oleh Undang-undang bertindak untuk dan atas nama PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/ Termohon Pailit I), tindakan yang demikian sah menurut hukum, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan atau harus mempertanggung jawabkan atas tindakan yang sesuai dengan hukum.
- Bahwa tidak dapat dibenarkan pula oleh hukum, Pemohon Peninjauan-kembali harus bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut sangat dibuat-buat dan mengada-ada.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum suatu perusahaan yang merupakan perusahaan keluarga, Majelis Hakim Agung terlalu gampang membuat pertimbangan tanpa didukung oleh hukum dan bukti. Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali bertindak dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya sebagai Direktur Utama sehingga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim Agung telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum oleh karena telah mempertimbangkan dan menyatakan PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II dengan tidak didasarkan atas bukti-bukti sama sekali.
- Bahwa permasalahan hutang Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit bukanlah permasalahan yang sederhana yang memerlukan pembuktian yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas dan dari bukti-bukti selama persidangan. Berdasarkan bukti P.2 berupa tanda terima kayu bulat dan bukti P.3 sampai P.14 dan bukti T.II-3 dan T.I-1 s/d T.13, timbul persoalan hukum, siapa yang harus bertanggung jawab apakah Termohon Kasasi I/ Termohon Pailit atau PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Ika Aneka Timber, PT. Ratu Mini, Budhiyanto, Masrini, Yunus, Melawati, Setiono, para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno sebagai para pemegang saham Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I yang lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Pailit I sebagai berikut :

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan kasasi yang kini dimohonkan Peninjauan Kembali terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan berikut ini :

- a. bahwa dalam putusan kasasi halaman 16 tertera pertimbangan bahwa para Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap Pemohon Pailit sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon Pailit I dan II;
- b. bahwa Termohon Pailit I adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dimana Termohon Pailit II, sebagai Direktur Utama dan Termohon Pailit I (bukti T.II.1);
- c. bahwa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Direksi (i.c. Termohon Pailit II) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, karena itu Termohon Pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya mewakili Termohon Pailit I (PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial/PT. KAWI) di dalam ataupun di luar pengadilan;
- d. bahwa dengan demikian putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) b. Undang-Undang Kepailitan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya baik dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit I maupun alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Pailit II, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : (1) PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) dan (2) PT. TOBENG MAHATANI tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 Nomor 030 K/N/2003 serta Mahkamah Agung mengadili kembali dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali berada dipihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: (1) PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) dan (2) TOBENG MAHATANI tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 Nomor 030 K/N/2003;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon : PT. WIJAYA INDAH PERMAI tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA tanggal 23 MARET 2004 dengan BAGIR MANAN., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., dan NY. MARIANNA SUTADI, SH., para Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., NY. MARIANNA SUTADI, SH., Hakim-Hakim Anggota dan ASRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd.

Ny. Marianna Sutadi, SH.

K e t u a

ttd.

Bagir Manan

Panitera Pengganti,

ttd.

Asra, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi PK	Rp.	9.993.000,-

Jumlah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 030 K/N/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. WIJAYA INDAH PERMAI berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 37 RT 12, Banjarmasin-70111, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rudi Agustian Hassim, SH.MH, Hasan Karman, SH.MM, A.G. Yuwidiandaya, SH, Endang Supriyono, SH dan Zainuddin Soti, SH. para Advokat dan Pengacara, beralamat di Wisma Sunter Blok C2, lantai 16, Jalan Yos Sudarso Kay 89 Jakarta 14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2003, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

m e l a w a n

1. **PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI)** berkedudukan di Jln. A. Yani Km. 4,5 No. 18-19 Banjarmasin 70249, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SOETOMO, SH.M.HUM dan DICKY RICHARD GIMON, SH., para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Wisma Gunung Anyar Timur IX-18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2003;
2. **TOBENG MAHATANI** bertempat tinggal di Jln. Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada DOREL AMIR, SH., Pengacara beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kav. 36 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2003, sebagai para Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Termohon Pailit I dan II/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit dimuka

persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 24 tanggal 7 Januari 1986 yang bergerak dalam usaha perkayuan antara lain pemasok dan penjual kayu gelondongan yang berkedudukan di Jl. Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin-Kalimantan Selatan 70111;

Tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

- Bahwa Pemohon Pailit dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon Pailit I, dimana Pemohon Pailit telah menjual kayu gelondongan (log) kepada Termohon I sebagai pembeli yang diwakili oleh Termohon Pailit II yang bertindak sebagai Direktur Utama dan pemegang saham;
- Bahwa Termohon Pailit I telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi objek jual beli sejumlah 529 Pcs dan Pemohon Pailit pada tanggal 7 Nopember 1997 sesuai tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/1997 (bukti P-2);
- Bahwa harga jual beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I sebagaimana diuraikan diatas adalah sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,- dan harga kayu gelondongan (log) dan DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai atau pembayaran telah jatuh tempo pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) oleh Termohon Pailit I dan Pemohon Pailit yaitu pada tanggal 7 Nopember 1997;
- Bahwa Pemohon Pailit sebagai penjual kayu gelondongan (log) yang beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli kepada Termohon Pailit I, namun ternyata kemudian Termohon Pailit I sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-;
- Bahwa atas hutang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan harus dibayar. Pemohon Pailit telah berkali-kali melakukan penagihan (bukti P-3 dan bukti P-4) namun Termohon Pailit I selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan (bukti P-5);
Tentang kedudukan Pemohon sebagai kreditur dari Termohon II;
- Bahwa keterkaitan Termohon Pailit II dalam permohonan kepailitan ini karena Termohon Pailit II sebagai Direktur Utama dan pemegang saham dari Termohon Pailit I yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng. Kewajiban tanggung renteng Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum Termohon Pailit II, Samudra & Partner

No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 (bukti P-6) No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 (bukti P-7) dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (bukti P-8);

- Bahwa atas utang-hutang Termohon Pailit I tersebut, Pemohon Pailit telah melakukan penagihan-penagihan, namun baru setelah utang tersebut berjalan hampir 3 tahun, melalui berbagai cara akhirnya pada tanggal 22 Maret 2003 terjadi pertemuan oleh dan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I yang diwakili oleh Termohon Pailit II, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Termohon Pailit I maupun sebagai diri sendiri. Dalam pertemuan tersebut, diadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas utang USD dan 12 % (dua belas persen) pertahun atas utang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei/Juni 2000 sampai dengan Desember 2000 (bukti P-9);
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo terakhir kesepakatan sebagaimana disebutkan diatas, pada tanggal 22 Desember 2000, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar Rp. 504.304.581,- sedangkan kewajiban utang Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit sebesar USD 179.412,48 beserta denda keterlambatan pembayarannya sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan tidak pernah dilunasinya;
- Bahwa Pemohon Pailit telah mengirimkan somasi kepada Termohon Pailit I untuk segera melunasi kewajibannya baik utang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran, hal ini terbukti dengan somasi sesuai dengan surat Pemohon Pailit No. 108/RAH-Law Firm/VII/2002 tanggal 22 Juli 2003 (bukti P-10);
- Bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II melalui kuasa hukumnya kembali mencari-cari berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yang pada intinya adalah berusaha untuk menghindar dari kewajiban hutangnya kepada Pemohon Pailit (vide bukti P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa dikarenakan jalan secara musyawarah tidak tercapai, maka Pemohon Pailit menyampaikan surat peringatan terakhir No. 277/RAH-Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 (bukti P-11) kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar USD 390.790,22 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua puluh dua dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari :
 - a. Utang pokok : USD 179.412,48;
 - b. Denda keterlambatan pembayaran : USD 211.377,74;belum termasuk biaya-biaya penagihan dan biaya-biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II mempunyai hutang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit, sehingga dengan demikian Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II memenuhi persyaratan pailit; Tentang Termohon Pailit I mempunyai hutang kepada Kreditor lain, selain Pemohon Pailit;
- Bahwa Termohon Pailit I juga mempunyai hutang kepada kreditor lain, yaitu :
 - a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dari PT. Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 01 Agustus 2003 (bukti P-12 dan bukti P-6);
 - b. PT. Sinarinda Buana Selaras, beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 5 RT.27 Banjarmasin (bukti P-13 dan bukti P-6);
 Tentang permohonan sita jaminan serta penunjukkan Hakim Pengawas dan Kurator;
- Bahwa guna melindungi kepentingan Pemohon Pailit, karena dikhawatirkan Termohon Pailit hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon Pailit, maka dimohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon Pailit yang sekarang ada maupun yang akan ada guna menjamin pelaksanaan pembayaran keseluruhan jumlah hutang;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Pemohon Pailit mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengangkat CORNELIUS BENI J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52–53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator dan Termohon Pailit dalam permohonan kepailitan ini, sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon Pailit menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon Pailit;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
3. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;

4. Menyatakan Termohon I PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24–25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon yang sekarang ada maupun yang akan ada;
7. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
8. Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dan Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52–53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing kuasa Pemohon Pailit, Termohon Pailit I dan II pada tanggal 9 Oktober 2003, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 07/Pailit/2003/PN.Niaga.Jkt.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit I dan II yang pada tanggal 16 Oktober 2003 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tanggal 27 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formul dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain yaitu pertimbangan pada halaman 20 alinea ke 2 dan halaman 21 alinea ke 3 dengan pertimbangan pada halaman 21 alinea ke 1, yang masing-masing pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada pertimbangan halaman 20 alinea ke 2, *judex facti* mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti P2, P3 s/d P13, telah terbukti bahwa Pemohon Pailit mempunyai tagihan kepada Termohon Pailit I berupa pembayaran atas harga kayu gelondongan (log) yang dibeli oleh Termohon Pailit I dari Pemohon Pailit;

Selanjutnya *judex facti* juga mempertimbangkan bahwa atas utang Termohon Pailit I tersebut timbul persoalan, beban tanggung jawab siapakah utang tersebut? (pertimbangan halaman 21 alinea ke 3); Kemudian dalam pertimbangan pada halaman 22 alinea 1 *judex facti* mempertimbangkan bahwa untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hutang Termohon Pailit I tersebut, pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, perkara a quo bukan wewenang dan Pengadilan Niaga;

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dapat dilihat dengan nyata :

- a. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut, disatu sisi telah mengakui kebenaran adanya hutang Termohon Kasasi I dahulu Termohon Pailit I kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit, tetapi disisi lainnya tidak membebaskan tanggung jawab hutang tersebut kepada Termohon Kasasi I, karena mustahil adanya suatu hutang tanpa adanya seorang yang berhutang, ini sungguh suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum.
- b. Bahwa didalam pertimbangan-pertimbangan *judex facti* dalam putusan a quo jelas telah terbukti secara sederhana Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang belum dibayar, akan tetapi anehnya *judex facti* tidak membebaskan tanggung jawab hutang tersebut kepada Termohon Kasasi I hanya karena didasarkan kepada bukti Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001 ("Akta No. 135") dan Akta Berita Acara Rapat Termohon Kasasi I No. 130 tanggal 30 Juni 2003 ("Akta No. 130") yang pembuatannya sangat bertentangan dengan asas kepatutan dan disengaja dibuat untuk menghilangkan tanggung jawab hutang Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi (mohon diperiksa hutang Termohon Kasasi I telah jatuh tempo pada tanggal 7 Nopember 1997).

- c. Bahwa sebenarnya telah terbukti secara sangat sederhana Pemohon Kasasi mempunyai tagihan kepada Termohon Kasasi I yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dan Termohon Kasasi I telah terbukti mempunyai utang kepada lebih dari satu Kreditor.
 2. Bahwa *judex facti* telah melanggar asas hukum karena telah membenarkan pengalihan saham yang meniadakan tanggung jawab utang seluruh badan hukum;
 3. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* atas bukti T1-I dan bukti T1-3 yang menyimpulkan bahwa dengan bukti-bukti tersebut, telah menghilangkan kewajiban pembayaran utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit, telah melanggar ketentuan asas hukum pembatalan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 jo Pasal 1340 KUHPerdata yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dibuat oleh para pemegang saham Termohon Pailit I dengan pihak-pihak lain, hanya berlaku untuk pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut saja;

Bahwa Pemohon Pailit meragukan itikad baik dari Termohon Pailit I dalam melaksanakan akta No. 130 dan Akta No. 135 karena tidak dilakukan secara terang-terangan dan tanpa persetujuan dari para Kreditor (kecuali PT. Bank Mandiri Tbk). Lagi pula utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit, telah terjadi jauh hari sebelum akta-akta tersebut ditandatangani;

Hal yang demikian itu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh pihak-pihak tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Dari ketentuan pasal tersebut maka seharusnya penandatanganan Akta No. 130 dan No. 135 tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dan para Kreditor Termohon Pailit I;
 - b. Bahwa Termohon Pailit I sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas, merupakan suatu objek hukum tersendiri disamping subjek hukum lain, sehingga segala tindakan hukum Termohon Pailit I termasuk dalam pembelian kayu (log) dari Pemohon Pailit yang menimbulkan utang, merupakan tanggung jawab Termohon Pailit I sebagai subjek hukum.

Bahwa terjadinya perbaikan pemegang saham dan/atau Direksi dan atau Komisaris, telah mengakibatkan hapusnya tanggung jawab dan Termohon Pailit I tersebut.
 - c. Bahwa Akta No. 135 tentang pembatalan jual beli saham, jelas hanya merupakan perikatan, belum terjadi jual beli;
 4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan pertimbangannya tumpang tindih yaitu pertimbangan yang terdapat pada putusan halaman 23 alinea ke 1 dan halaman 23 alinea ke 2 dengan pertimbangan pada halaman 23 alinea ke 5;

Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 23 alinea 1 dan 2 *judex facti* menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti TII-1, TII-2 dan TII-3 telah terbukti bahwa Termohon Pailit II adalah Direktur Utama dari Termohon Pailit I. Dan sebagai Direktur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan dan apabila bersalah dan lalai, direksi bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 85 ayat (2));

Bahwa namun kemudian pada halaman 23 alinea ke-5, *judex facti* mempertimbangkan bahwa meskipun Termohon Pailit II terbukti sebagai Direktur Utama dari Termohon Pailit I, Termohon Pailit II tidak bisa secara pribadi di pertanggung jawaban secara tanggung renteng atas kewajiban Termohon Pailit I;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut terlihat bahwa *judex facti* sangat ragu-ragu untuk menyatakan bahwa Termohon Pailit II sebagai Direktur Utama juga bertanggung jawab atas utang-utang Termohon Pailit I. Dan anehnya *judex facti* menggiring pertanggung jawaban pribadi Termohon Pailit II, padahal yang dimaksudkan Pemohon Pailit adalah bahwa Termohon Pailit II ikut bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama ketika utang piutang terjadi. Pemohon Pailit sama sekali tidak menyinggung dan membebaskan tanggung jawab Termohon Pailit II secara pribadi.

5. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang membebaskan tanggung jawab Termohon Pailit II atas utang Termohon Pailit I, jelas salah dan bertentangan dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang secara tegas menentukan tanggung-jawab Direksi.
6. Bahwa Termohon Pailit I adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, sehingga dalam praktek bisnisnya sudah tidak dapat dipisahkan lagi antara transaksi oleh dan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit I maupun Termohon Pailit II, dalam hal demikian pemegang saham dan/ atau Direksi ikut serta bertanggung jawab atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebagaimana ditegaskan secara nyata dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan.

Dengan demikian pertimbangan *judex facti* sebagaimana tersebut diatas sama sekali telah keliru menerapkan hukum dan harus dikoreksi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini.

7. Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan “menolak permohonan Pemohon” justru menimbulkan kerugian tidak saja bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sebagai Kreditor yang beritikad baik tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Bahwa putusan *judex facti* yang “tidak bijak” dan “jauh dan rasa keadilan dan kepatutan” tersebut justru akan menimbulkan permasalahan hukum yang sangat mendasar, karena putusan itu tidak saja akan dipergunakan sebagai “payung” atau “pelindung” bagi debitur yang beritikad buruk tetapi

juga akan menimbulkan “degradasi kepercayaan masyarakat pencari keadilan” terhadap lembaga peradilan pada umumnya dan peradilan niaga khususnya.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi sebagai berikut :

Menimbang,

mengenai ad. 1 s/d ad. 6.

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, dimana *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena pengertian utang tidak dapat diartikan dalam arti sempit, tetapi utang dalam arti luas, yang dapat terjadi karena perjanjian maupun karena Undang-undang, lagi pula adanya utang para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit, dapat dibuktikan secara sederhana, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti* bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II telah terbukti berutang kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit yaitu berdasarkan transaksi jual-beli kayu gelondongan (log) sesuai dengan bukti P-2 yang kemudian diperkuat lagi dengan Akta Pengakuan Utang tanggal 6 Agustus 2000 (bukti TI-4);
- Bahwa meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, direktur dan komisaris namun para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II, maka sebagai badan hukum (*Rechts persoon*) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Selain itu bahwa pembuatan pengalihan saham-saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual beli saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001;
- Bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit tersebut, karena meskipun Termohon Pailit I sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (*Perseroan Terbatas*) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas kiranya cukup jelas bahwa adanya utang para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II, kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit telah terbukti dan utang tersebut belum dibayar walaupun telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana ke semua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa kemudian, pula telah nyata dan terbukti bahwa selain kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit, para Termohon Kasasi (Termohon Pailit I

dan II) juga mempunyai utang kepada pihak lain, diantaranya kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Sinarindo Buana Selaras.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung, permohonan pailit yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK, dan oleh karenanya beralasan untuk menyatakan Termohon Pailit I dan II dalam keadaan pailit.

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II dinyatakan pailit, maka sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon Pailit, harus di angkat Sdr. Cornelius Beny J, SH dari Kantor hukum Jusuf Indradewa & Partners untuk menjadi Kurator dalam kepailitan ini, dan dengan memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkat Hakim Pengawas yang akan mengawasi pengurusan dan pemberesan harta-harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA SBY. Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan aman sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II harus dibebani membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Wijaya Indah Permai tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY.

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
- Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih 1 (satu) kreditur;

- Menyatakan Termohon I PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan harta milik Termohon Pailit I dan II jatuh dalam sitaan umum;
- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Pailit;
- Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. CHT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;

Menghukum para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I dan II untuk membayar ongkos perkara pada semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 20 November 2003 dengan ARBIJOTO, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOF, SH.MA, dan SUNARDI PADANG, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. VALERINE J. L. KRIEKHOF, SH.MA, SUNARDI PADANG, SH., Hakim-Hakim Anggota dan PAHALA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-hakim Anggota

ttd.

Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhof, SH.MA.

ttd.

Sunardi Padang, SH.

K e t u a

ttd.

Arbijoto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Pahala Simanjuntak, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.	4.993.000,-

Jumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan kepailitan dan :

PT. WIJAYA INDAH PERMAI, berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 37, RT 12 Banjarmasin - 70111, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: RUDI AGUSTIAN HASSIM, S.H., M.H., HASAN KARMAN, S.H., MM., A.G. YUWIDIANDAYA, S.H., ENDANG SUPRIYONO, SH. dan ZAINUDDIN SOTI, SH., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada RAH & Partners Law, berkantor di Wisma Mitra Sunter Blok (22, Lantai 16, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta - 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2003, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

t e r h a d a p

1. **PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT KAWI)**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 4,5 No. 18-19 Banjarmasin 70249, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya SOETOMO, S.H., M.Hum. dan DICKY RICHARD GIMON. S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dicky Richard Gimon, SH & Rekan. berkantor di Jalan Wisma Gunung Anyar Timur IX-18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2003, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;
2. **TOBENG MAHATANI**, bertempat tinggal di di Jalan Kebon Kacang Rava No. 24-25 Jakarta Pusat , dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya DOREL ALMIR, S.H., JUL HERFI, S.H., DEDI KURNIAWAN, S.H, YULI SARASWATI, SH. dan DEVI ANANJI, SH.. para Pengacara pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Almir & Partners, berkantor di Wisma Benhil Lantai 7, Jalan Jend. Sudirman Kav 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2003, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri – Niaga Surabaya tanggal 10 September 2003 Nomor 01/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon, surat tanggapan dari para Termohon dan pernyataan sikap dari Kreditor Lain serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dan Pemohon dan para Termohon;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti dan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 September 2003 dibawah register No. 07/PAILIT/2003/PN. NIAGA.SBY mengemukakan sebagai berikut :

I. Tentang Pemohon;

- (1) Bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 24 tanggal 7 Januari 1986 yang dibuat dihadapan Susanti, S.H., Notaris di Surabaya (bukti P-Ia) dan telah mendapat pengesahan dan Menteri Kehakiman dan HAM No. C2-4001.HT.01.01TH-86 tanggal 29 Mei 1986, akta Pendirian tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Akta Nomor 9 tanggal 15 September 1998 yang dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH. Notaris di Bekasi (bukti P-1b);
- (2) Pemohon berkedudukan di Jl. Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin-Kalimantan Selatan 70111, dan bergerak dalam usaha perkebunan antara lain pemasok dan penjual kayu gelondongan (log);

II. Tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

- (3) Bahwa Pemohon dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon I dimana Pemohon sebagai penjual kayu gelondongan (log) telah menjual kepada Termohon I sebagai pembeli kayu gelondongan (log);
- (4) Bahwa dalam melakukan perikatan hukum dengan Pemohon, Termohon I diwakili oleh Termohon II yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan pemegang saham;
- (5) Bahwa Termohon I telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi obyek jual beli sejumlah 529 Pcs dan Pemohon pada tanggal 7 Nopember 1997 sesuai tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/1997 (bukti P-2);
- (6) Bahwa harga jual-beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I sebagaimana diuraikan dalam point 2 diatas adalah sebesar

USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,- dan harga kayu gelondongan (log dan DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai atau pembayaran telah jatuh tempo pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) oleh Termohon I dan Pemohon yaitu pada tanggal 7 Nopember 1997;

- (7) Bahwa Pemohon sebagai penjual kayu gelondongan (log) yang beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) yaitu menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli berupa kayu gelondongan (log) kepada Termohon I, namun ternyata kemudian Termohon I sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-;
- (8) Bahwa atas hutang Termohon I kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan harus dibayar, Pemohon telah berkali-kali melakukan penagihan kepada Termohon I (bukti P-3 dan bukti P-4) namun Termohon I selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan (bukti P-5);

III. Tentang kedudukan Pemohon sebagai kreditur dari Termohon II;

- (9) Bahwa keterkaitan Termohon II dalam permohonan kepailitan ini karena Termohon II sebagai direktur utama dari pemegang saham dari Termohon I yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng, kewajiban tanggung renteng Termohon I dan Termohon II dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum Termohon II, Samudra & Partner No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 (bukti P6) No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 (bukti P-7) dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (bukti P-8);
- (10) Bahwa atas hutang-hutang Termohon I tersebut, Pemohon telah melakukan penagihan-penagihan, namun baru setelah hutang tersebut berjalan hampir 3 tahun, melalui berbagai cara akhirnya pada tanggal 22 Maret 2000 terjadi pertemuan oleh dan antara Pemohon dan Termohon I yang diwakili oleh Termohon II, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari Termohon I maupun sebagai diri sendiri, dalam pertemuan tersebut, Termohon I dan Termohon II dengan Pemohon mengadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas hutang USD dan 12 % (dua belas persen) pertahun atas hutang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei/Juni 2000 sampai dengan Desember 2000 (bukti P-9);
- (11) Bahwa sampai dengan jatuh tempo terakhir kesempatan sebagaimana dalam butir 9 diatas pada tanggal 22 Desember 2000, Termohon I dan Termohon II hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar

Rp. 504.304.581,- sedangkan kewajiban hutang Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon sebesar USD 179.412,48 beserta denda keterlambatan pembayarannya sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan tidak pernah dilunasinya;

- (12) Bahwa Pemohon akhirnya mengirimkan somasi kepada Termohon I untuk segera melunasi kewajibannya kepada Pemohon, baik hutang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran, hal ini terbukti dengan somasi yang telah Pemohon sampaikan sesuai dengan surat pemohon No. 108/RAH-Law Firm/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 (bukti P-10);
- (13) Bahwa Termohon I dan Termohon II melalui kuasa hukumnya kembali mencari cari berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yang pada intinya adalah berusaha untuk menghindari dan kewajiban hutangnya kepada Pemohon (vide bukti P-6, P-7 dan P-8);
- (14) Bahwa dikarenakan jalan secara musyawarah dan itikad baik Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II tidak ditanggapi secara serius, maka Pemohon menyampaikan surat peringatan terakhir No. 277/RAH-Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 (bukti P-II) kepada Termohon I dan Termohon II untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar USD 390.790,22 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua puluh dua dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari :
 - a. Hutang Pokok : USD 179.412,48;
 - b. Denda keterlambatan pembayaran : USD 211.377,74;Belum termasuk biaya-biaya penagihan dan biaya-biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian;
- (15) Bahwa dari uraian No. 1 s/d 10 tersebut diatas, telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon, sehingga dengan demikian Termohon I dan Termohon II memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit;

IV. Tentang Termohon I mempunyai hutang kepada kreditur lain, selain Pemohon;

- (16) Bahwa disamping Termohon I mempunyai hutang kepada Pemohon, Termohon I juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu :
 - a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dan PT Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 01 Agustus 2003 (bukti P-12 dan vide bukti P-6);

- b. PT. Sinarinda Buana Selaras, beralamat di Jl. RE. Martadinata No, 5 RT.27 Banjarmasin (bukti P-13 dan vide bukti P-6);

(17) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah jelas terbukti secara sederhana fakta/ hukum dan keadaan hukum dan keadaan sebagai syarat Termohon I harus dinyatakan pailit karena telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu :

- a. Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- b. Termohon juga mempunyai kreditur lain atau mempunyai lebih dari satu kreditur;

V. Tentang permohonan sita jaminan serta penunjukkan Hakim Pengawas dan Kurator.

(18) Bahwa oleh karena adanya ketentuan pasal 7 Ordonansi Kepailitan sebagaimana diubah dan ditambah dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka guna melindungi kepentingan Pemohon, karena dikhawatirkan Termohon hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan pemohon, maka dimohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon yang sekarang ada maupun yang akan ada guna menjamin pelaksanaan pembayaran keseluruhan jumlah hutang;

(19) Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) ordonansi kepailitan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dengan ini Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengangkat CORNELIUS BENY J, SH. dan Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners. beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator dan Termohon dalam permohonan kepailitan ini, sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
3. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;
4. Menyatakan Termohon I PT KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon yang sekarang ada maupun yang akan ada;
7. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
8. Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH. dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, telah hadir untuk masing-masing Pemohon dan para Termohon adalah para Kuasanya masing-masing serta untuk Kreditur Lain : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang hadir adalah para Kuasanya Hendro Pramono, S.H., Drs. Edy Purwanto, Edy Irsam dan Henry Hendaryadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2003 No. 072/SK.CHC.LGL/2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan pula surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon masing-masing telah mengajukan tanggapan tertulis yang masing-masing tertanggal 30 September 2003 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Termohon I :

1. Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan pernyataan Pailit Nomor 07/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tertanggal 10 September 2003;

Termohon I bukan sebagai Debitur dari Pemohon;

2. Bahwa Termohon I tidak mempunyai hutang kepada Pemohon dan tidak pernah terjadi adanya hubungan hukum, karena berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT KAWI) Nomor 130, tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Rubensjah Sjachran, SH. Notaris di Banjarmasin yang pada pokoknya memutuskan dengan suara bulat hal-hal sebagai berikut :
 - 2.1. Menyetujui dan menegaskan kembali tentang penjualan/penyerahan seluruh saham-saham milik PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT Kawi) masing-masing kepada :
 - Perseroan Terbatas PT Sinarindo Buana Selaras berkedudukan di Banjarmasin sebanyak 5.643.000 (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu) saham;
 - Suyato Sarjana Ekonomi dan Master of Bussines Adminstration sebanyak 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham;
 - 2.2. Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang lama dan pengangkatan Harryadi Limantara, Suyato SE, MBA serta Harry Jansjah Limantara masing-masing dan berturut turut selaku Direktur Utama, Direktur dan Komisaris Perseroan yang baru;
 - 2.3. Seluruh hutang/kewajiban keuangan perseroan yang telah ada sebelum penandatanganan akta jual beli saham yang dimaksud (terkecuali hutang/kewajiban keuangan perseroan kepada perseroan terbatas PT Bank Mandiri (ex Bank Bumi Daya Cabang Banjarmasin) sebagaimana dimaksud dalam akta pengikatan jual beli saham bertanggal sembilan belas (19) Oktober dua ribu satu (2001) Nomor 135 yang dibuat dihadapan saya, Notaris tetap menjadi beban dan tanggungan serta harus dibayar oleh pemegang saham yang lama dari perseroan.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah tidak dapat diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya, maka Termohon I bukanlah sebagai debitur dan Pemohon, karena selain senyatanya sudah tidak ada lagi hubungan hukum, juga masalah-masalah hutang ataupun kewajiban-kewajiban menjadi beban dan tanggungan adalah menjadi beban yang harus dibayar oleh pemegang saham lama dari perseroan tersebut dan bukan Termohon I;
4. Bahwa lebih lanjut dengan menunjuk akte pengakuan hutang kepada PT Wijaya Indah Permai dalam rangka penyelesaian jual beli saham PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT KAWI) kepada PT Sinarindo Buana Selaras dalam pasal 1 dan 2 secara jelas tersurat dan tersirat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT Kawi) tidak mempunyai hutang kepada PT Wijaya Indah Permai.

5. Bahwa dengan adanya Akte Pengakuan Hutang tersebut, maka secara hukum Termohon I sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada PT Sinarindo Buana Selaras, dengan demikian persyaratan jumlah kreditur minimal 2 (dua) untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit in casu perkara ini sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan jelas tidak terpenuhi, apalagi Termohon I usahanya bergerak dalam bidang perkayuan yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga haruslah dipikirkan dampak negatif dan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum telah jelas sebagaimana yang notaris Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH., Notaris di Banjarmasin dan juga akta pengakuan hutang kepada PT. Wijaya Indah Permai dalam rangka penyelesaian jual beli saham PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT KAWI) tidak mempunyai hutang kepada PT. Sinarindo Buana Selaras;
7. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Termohon I bukannya debitur dan tidak mempunyai hutang kepada Pemohon dan kepada PT Sinarindo Buana Selaras, oleh karena itu dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon I selain mempunyai hutang kepada Pemohon juga mempunyai hutang kepada PT Sinarindo Buana Selaras haruslah ditolak oleh karena didalam akta Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, S.H., Notaris di Banjarmasin dan akta Pengakuan Hutang kepada PT. Wijaya Indah Permai dalam rangka penyelesaian jual beli saham PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT. Kawi) kepada PT. Sinarindo Buana Selaras tersebut telah jelas terbukti Termohon I tidak ada sangkut pautnya karena bukan sebagai pihak dan bukan sebagai debitur dan PT. Wijaya Indah Permai dan PT. Sinarindo Buana Selaras;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, permohonan Pailit Pemohon haruslah ditolak karena tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan Termohon I bukan sebagai Debitur dan tidak mempunyai hutang kepada Pemohon dan PT. Sinarindo Buana Selaras dan tidak dalam keadaan berhenti membayar karena tidak mampu, karenanya tidak ada obyek menurut Undang-undang Kepailitan;

MAKA : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon I mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pailit Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

II. Termohon II :

I. Termohon II tidak memiliki kapasitas sebagai Debitur;

1. Bahwa sesuai angka 9 surat permohonannya, Pemohon memposisikan Bpk. Tobeng Mahatani sebagai Termohon II dalam perkara ini atas dasar memiliki keterkaitan sebagai Direktur Utama dan Pemegang saham dari Termohon I sehingga bertanggung jawab secara tanggung renteng adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan logika hukum oleh karena hanya didasarkan pada surat-surat konsultan hukum, kewajiban untuk memikul tanggung jawab secara tanggung renteng haruslah diperjanjikan dan dengan menyebutkan bagian tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan pasal 1282 KUH Perdata : “Tiada perikatan tanggung renteng (tanggung menanggung) kecuali jika dinyatakan dengan tegas” dikaitkan dengan pasal tersebut tidak ada perjanjian tanggung renteng antara Termohon I dengan Termohon II sehingga surat-surat konsultan hukum (bukti P-6, bukti P-7, bukti P-9) tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum adanya tanggung jawab secara tanggung renteng yang harus dipikul oleh Termohon I dan Termohon II;
2. Bahwa dari segi tanggung jawab direksi akibat pailit sesuai pasal 90 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Direksi dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng jika lalai atau melakukan kesalahan dalam melakukan pengurusan sehingga harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat pailit, akan tetapi dalam konteks ketentuan tersebut permohonan pailit terhadap perseroan harus diajukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan itu sendiri atau dengan kata lain perseroan memailitkan diri sendiri, dalam hal ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Termohon I dan Termohon II harus bertanggung jawab secara tanggung renteng akibat putusan pailit;
3. Bahwa selain itu dan segi tanggung jawab pemegang saham berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 pemegang saham hanya dapat dituntut secara tanggung renteng apabila perseroan belum disahkan sebagai badan hukum atau pemegang saham yang bersangkutan memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan, kesemua pelanggaran tersebut memerlukan pembuktian yang sangat kompleks dan tidak sederhana sehingga harus diajukan pada Pengadilan Negeri dan bukan pada Pengadilan Niaga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti tanggung jawab yang harus dipikul secara tanggung renteng memerlukan dasar hukum

adanya perjanjian tanggung renteng, adanya putusan pengadilan yang memutus pembebanan kewajiban tanggung renteng dan selain itu tuntutan pertanggung jawaban secara tanggung renteng memerlukan pembuktian yang tidak sederhana atau sumir, dengan demikian permohonan pemohon haruslah tidak dapat diterima oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata yang harus diadili pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum;

II. Obyek perkara bukan wewenang Pengadilan Niaga :

5. Bahwa pada angka 3 surat permohonannya, Pemohon menyatakan adanya perikatan jual beli log (kayu gelondongan) antara Pemohon sebagai penjual dengan Termohon I sebagai pembeli yang pada waktu itu diwakili oleh Termohon II dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan dari hubungan hukum tersebut Termohon I tidak atau kurang melaksanakan prestasi berupa pembayaran;
6. Bahwa apabila implementasi dari perjanjian jual beli tersebut tidak ada pembayaran atau masih kurangnya pembayaran maka hal ini dalam kerangka hukum kepailitan bukanlah sebagai yang dimaksud dengan hutang akan tetapi perbuatan wanprestasi oleh karena sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan beserta penjelasannya telah dicantumkan dengan jelas bahwa harus ada hubungan hukum hutang, sedangkan pengertian hutang yang tidak dibayar oleh debitur itu adalah hutang pokok dan bunga dengan demikian hutang yang dimaksud adalah hutang yang timbul dari hubungan hukum pinjam meminjam uang, bukan hutang yang timbul dari transaksi jual beli antara Pemohon dengan Termohon I meskipun akibat hukum keduanya dapat berujung pada Wanprestasi;
7. Bahwa selanjutnya dengan menganalisis uraian pada bagian konsiderans Undang-Undang No. 4 tahun 1998 maka maksud dan tujuan dibentuknya peraturan kepailitan adalah dalam rangka mengatasi gejala moneter beserta segala akibatnya yang mengganggu kegiatan perekonomian sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian hutang piutang perusahaan yang cepat dan dengan proses pembuktian yang sederhana, guna mencapai maksud dan tujuan tersebut maka persyaratan perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga haruslah berawal dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang dan tidak meliputi wanprestasi dari hubungan hukum jual beli, pemborongan kerja dan sebagainya;
8. Bahwa pengertian hutang harus bersumber dan hubungan hukum pinjam meminjam telah dilaksanakan melalui berbagai putusan sehingga menjadi yurisprudensi tetap antara lain :

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 03 K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 03 K/N/1999 tanggal 5 Mei 1999;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 05.K/N/1999 tanggal 2 Maret 1999;

Majelis Hakim Agung dalam perkara-perkara tersebut diatas telah berhasil melakukan penentuan hukum dengan berpikir bijaksana, jernih dan mandiri dalam mengartikan hutang yang sesuai dengan jiwa dan spirit Undang-Undang No. 4 tahun 1998;

9. Bahwa oleh karena terminologi hutang yang dituntut oleh Pemohon bukanlah hutang yang timbul dari hubungan hukum hutang piutang akan tetapi timbul dari hubungan hukum hutang piutang akan tetapi timbul dari hubungan hukum jual beli dimana salah satu pihak wanprestasi terhadap pihak lainnya maka, seharusnya tuntutan dari Pemohon diajukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri bukannya ke Pengadilan Niaga;

III. Persyaratan Minimal 2 Kreditur Tidak Terpenuhi;

10. Bahwa persyaratan jumlah kreditur minimal 2 (dua) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon II tidak terpenuhi oleh karena terhadap kreditur lainnya yaitu PT. Bank Mandiri Tbk, dan PT. Sinarindo Buana Selaras. Termohon II tidak memiliki hubungan hukum apapun, sehingga karenanya Termohon II tidak memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan ditagih Bank Mandiri Tbk, maupun PT. Sinarindo Buana Selaras;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah jelas bahwa fakta dan keadaan sebagai syarat Termohon II dinyatakan Pailit sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 oleh karena Termohon II pada kenyataannya tidak mempunyai hutang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Termohon II juga tidak mempunyai kreditur lain;

IV. Permohonan sita jaminan terhadap kekayaan Termohon II haruslah ditolak;

12. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan untuk mempailitkan Termohon II, maka demi hukum permohonan sita jaminan terhadap kekayaan Termohon II haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas fakta dari argumentasi hukum yang melatarbelakangi permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Termohon II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya agar berkenan untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima tanggapan Termohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon terhadap Termohon II;
3. Menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon terhadap Termohon II atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sedangkan Kreditur Lain : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, terhadap permohonan Pemohon mengajukan pernyataan sikap dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Sehubungan dengan perkara Pailit No. 07/Pailit/2003/PN.Niaga Sby dengan ini kami beritahukan bahwa terhadap perkara dimaksud kedudukan kami adalah sebagai Kreditur yang memegang hak preference (kreditur separatis) PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT KAWI) selaku Termohon I, untuk itu kami berpendapat bahwa dalam proses permohonan Pailit yang diajukan oleh PT Wijaya Indah Permai dimaksud, kami tidak akan ikut serta dalam proses perkara kepailitan tersebut dan mohon kiranya kami tetap diakui sebagai kreditur separatis/preference dengan segala akibat hukumnya;

Terlepas dari perkara dimaksud, tidak berkelebihan kami informasikan bahwa PT Kawi adalah debitur kami yang cukup potensial dan saat ini sedang dalam tahap restrukturisasi yang kami harapkan dimasa yang akan datang perusahaan dimaksud mampu berkembang kearah yang lebih baik, sehubungan dengan hal tersebut, dengan tidak bermaksud mencampuri/mempengaruhi keputusan yang akan Majelis Hakim yang terhormat putuskan dalam perkara aquo, kami berpendapat bahwa PT Kawi tidak layak dipailitkan dan apabila PT. Kawi nantinya berkembang akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan dapat berperan dalam pembangunan perekonomian nasional, adapun dasar pemikiran kami merestrukturisasi PT Kawi disamping perusahaan tersebut cukup potensial untuk berkembang, juga dikarenakan adanya hubungan bisnis yang harmonis;

Sehubungan pernyataan sikap dan informasi tsb diatas, kiranya Yth. Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu terdiri dari :

1. Fotokopi dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Indah Permai No. 24 tanggal 7 Januari 1986, dibuat dihadapan Susanti, SH, Notaris di Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wijaya Indah Permai No. 24 tanggal 15 September 1998, dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH, Notaris di Bekasi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-1b;
3. Fotokopi dari tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/1997 tanggal 7 Nopember 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-2;
4. Fotokopi dari surat dari PT. Wijaya Indah Permai No. 022/WIP-JKT/I/00 tanggal 21 Januari 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-3;
5. Fotokopi surat dari PT. Wijaya Indah Permai No. 23/WIP-JKT/II/2000 tanggal 2 Pebruari 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-4;
6. Fotokopi surat dari PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial No. 02/KW-J/II/2000 tanggal 14 Pebruari 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-5;
7. Fotokopi surat dari Samudra As Sinaga, SH. kuasa hukum Tobeng Mahatani No. 148/S&P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-6;
8. Fotokopi surat dari Samudra As Sinaga, SH. kuasa hukum Tobang Mahatani No. 162/S&P/07/2003 tanggal 29 Juli 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-7;
9. Fotokopi surat dari Samudra As Sinaga, SH. kuasa hukum Tobang Mahatani No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-8;
10. Fotokopi Kewajiban PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial kepada PT. Wijaya Indah Permai per 31 Maret 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-9;
11. Fotokopi surat dan Kuasa Hukum PT. Wijaya Indah Permai No. 108/RAH-Law Firm/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-10;

12. Fotokopi surat dari Kuasa Hukum PT. Wijaya Indah Permai No. 277/RAH-Law Firm/VIII/2003 tanggal 8 Agustus 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-11;
13. Fotokopi surat dari Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-12;
14. Fotokopi surat dari PT. Sinarindo Buana Selaras No. 003/SBS/WIP-RAH/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, para Termohon masing-masing telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu terdiri dari :

I. Termohon I :

1. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial No. 130 tanggal 30 Juni 2003, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH., Notaris di Banjarmasin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 131 tanggal 30 Juni 2003, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH, Notaris di Banjarmasin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial No. 146 tanggal 30 Juni 2003, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH. Notaris di Banjarmasin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang kepada PT. Wijaya Indah Permai tanggal 6 Agustus 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda T.1-4;

II. Termohon II :

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7046.HT.01.04-Th'92 tanggal 26 Agustus 1992, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karunia Wana Ika Industrial No. 29 tanggal 11 Agustus 2000, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH, Notaris di Banjarmasin, yang diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Akta Pengikatan jual beli saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH, Notaris di Banjarmasin, yang diberi tanda bukti T.II-3;

4. Fotokopi Tagihan (kwitansi) pembayaran harga kayu logs sebesar US \$ 179.412,43 tanggal 22 Desember 1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Surat dari PT. Karunia Wana Ika Industrial No. 02/KW-J/II/2000 tanggal 14 Pebruari 2000, yang diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi Surat dari PT Wijaya Indah Permai No. 002/WIP-JKT/IX/2002 tanggal 16 September 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda bukti T.II-6;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka untuk selanjutnya ditunjuk hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah jelas sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tersebut pada pokoknya bermaksud agar para Termohon I PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial dan Termohon II Tobeng Mahatani dinyatakan pailit dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa Termohon I memiliki hutang yang belum dibayar kepada Pemohon sebesar USS 390,790.22 sebagai pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I dan Pemohon serta denda keterlambatan pembayaran;
- bahwa hutang tersebut sudah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo, karena pembayaran atas kayu gelondongan (log) harus dilakukan pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) tersebut oleh Termohon I dari Pemohon, yaitu pada tanggal 7 November 1997;
- bahwa Termohon I juga mempunyai hutang lain yaitu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Sinarindo Buana Selaras;
- bahwa Termohon II adalah Direktur Utama dan Pemegang Saham Termohon I, sehingga harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban Termohon I;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam tanggapan mereka masing-masing telah menyangkal semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Termohon I :

- Bahwa Termohon I tidak mempunyai hutang dan hubungan hukum dengan Pemohon, karena semenjak tanggal 19 Oktober 2001 dan selanjutnya tanggal 30 Juni 2003 sebagian besar saham Termohon I telah dijual masing-masing :
 - sejumlah 5.643.000 (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu) saham kepada PT Sinarindo Buana Selaras;
 - sejumlah 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham kepada Suyato, S.E.,M.B.A.;
- Bahwa perubahan kepemilikan saham Termohon I tersebut disertai dengan perjanjian yang mengatur tentang tanggungjawab atas hutang-hutang Termohon I yang ada, sehingga Termohon I merasa tidak bertanggung jawab bila ada hutang Termohon I yang dulu kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon I tidak mempunyai kreditur-kreditur sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya, karena dengan penjualan saham Termohon I kepada PT. Sinarindo Buana Selaras tersebut, secara langsung pula kewajiban Termohon I kepada PT. Sinarindo Buana Selaras telah selesai;

II. Termohon II :

- Bahwa Termohon II tidak bisa ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban Termohon I kepada Pemohon, baik Termohon II sebagai Direktur Utama Termohon I, maupun sebagai Pemegang Saham Termohon I;
- Bahwa hutang Termohon I kepada Pemohon yang timbul dari transaksi jual beli sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah sebagai hutang yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
- Bahwa Termohon II tidak mempunyai kreditur-kreditur sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya, karena Termohon II tidak memiliki hutang kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT. Sinarindo Buana Selaras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pokok-pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Termohon I memiliki hutang yang belum dibayar kepada Pemohon sebesar US\$ 390,790.22 sebagai pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I dari Pemohon serta denda keterlambatan pembayarannya?;

2. Apakah Termohon I juga mempunyai hutang lain, yaitu kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT. Sinarindo Buana Selaras?;
3. Apakah Termohon II sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham Termohon I bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban Termohon I berupa hutang kepada Pemohon?;

Menimbang, bahwa dalam pokok permasalahan hukum ad. 1 di atas, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa tanda terima kayu bulat dan bukti-bukti P-3 sampai dengan bukti P13, telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai tagihan kepada Termohon I berupa pembayaran atas harga kayu gelondongan (log) yang dibeli oleh Termohon I dari Pemohon;

Menimbang, bahwa namun Termohon I mendalilkan bahwa antara Termohon I dengan Pemohon tidak ada hubungan utang piutang dan hubungan hukum, karena sejak 19 Oktober 2001 kepemilikan saham Termohon I telah beralih;

Menimbang, bahwa bukti T.II-3 berupa Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 dan bukti TI-1 berupa Akta Berita Acara Rapat PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 menjadi dasar dan ijin bagi PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Ika Aneka Timber, PT. Raw Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno sebagai pemegang 5.940.000 saham Termohon I untuk menjual dan menyerahkannya masing-masing sejumlah 5.643.000 saham kepada PT. Sinarindo Buana Selaras dan 297.000 saham kepada Suyato, SE.MBA.;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.I-2 berupa Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 131 tanggal 30 Juni 2003 dan bukti T.I-3 berupa Akta Berita Acara Rapat PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial Nomor 146 tanggal 30 Juni 2003 telah dilakukan penjualan saham Termohon I dan PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Ika Aneka Timber, PT. Ratu Mini, Budhiyanto, Masrani Yunus, Melawati Setiono, para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno masing-masing sejumlah 5.643.000 saham kepada PT. Sinarindo Buana Selaras dan 297.000 saham kepada Suyato, S.E., M.B.A., sehingga dari seluruh saham Termohon I yang berjumlah 6.000.000 saham, hanya tinggal 36.000 saham yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Negeri "Amaliyah" dan 24.000 saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan "Karunia";

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-3 berupa Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 dan bukti T.I-1 berupa Akta Berita Acara Rapat PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 masing-masing dalam pasal 3 alinea 2 dan putusan rapat point 3 disepakati dan dijamin oleh PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Ika Aneka Timber, PT. Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus, Melawati Setiono, para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno, ternyata telah disepakati bahwa seluruh hutang/kewajiban Termohon I yang telah ada sebelum tanggal 30 Juni 2003, kecuali kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tetap menjadi beban dan tanggungan para pemegang saham

Termohon I yang lama (PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Ika Aneka Timber, PT. Ratu Mini, Budhiyanto, Masrani Yunus, Melawati Setiono, para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno);

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul persoalan terhadap hutang Termohon I kepada Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti dengan bukti P-2 berupa tanda terima kayu bulat dan bukti-bukti P-3 sampai dengan bukti P-13, menjadi beban tanggung jawab siapa?, apakah menjadi beban tanggung jawab Termohon I atau PT Giat Timber Corporation, PT. Giat Ika Aneka Timber, PT. Ratu Mini, Budhiyanto, Masrani Yunus, Melawati Setiono, para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno, sebagai pemegang saham Termohon I yang lama (berdasarkan bukti-bukti T.II-3 dan T.I-I sampai dengan T.I-3)?,

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hutang Termohon I kepada Pemohon seperti pertanyaan diatas, menurut Pengadilan merupakan suatu permasalahan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Niaga, karena pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan), sehingga hal ini menjadi kewenangan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, maka terhadap pokok permasalahan hukum ad.2 tersebut di atas, yaitu apakah memang benar Termohon I mempunyai kreditur-kreditur lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pengadilan berkesimpulan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, dengan demikian berarti pula dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil Pemohon yang lainnya, permohonan Pemohon terhadap Termohon I harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon II juga dimohonkan pailit oleh Pemohon, karena sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham Termohon I, Termohon II harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap hutang Termohon I, sehingga Pengadilan merasa perlu juga untuk mempertimbangkan pokok permasalahan hukum ad.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan, baik dari Pemohon, maupun dari para Termohon, tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Termohon II adalah pemegang Saham Termohon I, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon II adalah pemegang saham Termohon I harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dan bukti-bukti T.II-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial Nomor 29 tanggal 11 Agustus

2000, bukti T.II-3 berupa Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 serta bukti T.I-1 berupa Akta Berita Acara Rapat PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 menunjukkan bahwa Termohon II adalah Direktur Utama dari Termohon I;

Menimbang, bahwa menurut pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi, bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 85 ayat (1) Undang-undang tersebut, yaitu wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar seorang Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, haruslah ditentukan lebih dahulu bahwa ia telah bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam kepailitan menurut Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa Direksi bisa secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian perseroan, bila kepailitan itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Direksi, berarti bahwa telah terjadi kepailitan terhadap perseroan dan dapat ditentukan pula bahwa kepailitan itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Direksi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon II terbukti adalah Direktur Utama dari Termohon I dan Direktur Utama adalah Direksi, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Termohon II sebagai Direktur Utama dan Termohon I tidak bisa secara pribadi dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng atas kewajiban Termohon I, dengan demikian berarti pula bahwa permohonan menyatakan pailit Pemohon terhadap Termohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pernyataan pailit ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 7 OKTOBER 2003 oleh kami : BINSAR P. PAKPAHAN sebagai Ketua Majelis, Ny. PURNAMAWATI, S.H., M.Hum. dan EDDY NUGROHO, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari K A M I S tanggal 9 OKTOBER 2003 diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. MUHAMMAD ISA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Ny. Purnamawati, SH.M.Hum.

ttd.

Eddy Nugroho, SH.

K e t u a

ttd.

Binsar P. Pakpahan

Panitera Pengganti.

ttd.

H. Muhammad Isa, SH.